

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Program PPM    | KOMPETITIF                   |
| Sumber Dana    | DIPA Universitas Andalas     |
| Besar Anggaran | Rp 4.000.000,-               |
| Tim Pelaksana  | Fauzan Misra dan Aries Tanno |
| Fakultas       | Ekonomi                      |
| Lokasi         | Sumatera Barat               |

## **PELATIHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BAGI STAF AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH: KEBUTUHAN SEBUAH PROSES BERKELANJUTAN**

### **ABSTRACT**

During the last decades, public sector and governmental accounting reforms have been adopted in many countries, including Indonesia. However, after several years the governmental accounting standard has been implemented, the implementation by local governments is still relatively weak. This is evident by the fact that many local governments are still incapable of devising financial statement in compliance with Generally Accepted Accounting Principle/ Accounting Standards, although some regions have managed to devise reliable financial statement and obtained good audit opinion.

Several previous researches have identified various factors that have influences on the presentation and disclosure of local government financial statement and one of them is accounting training for local government accounting staff. To bridge this problem, we held accounting training for local government staff in West Sumatera Province.

The result of this activity shows that staff in several local governments have limited basic knowledge and skill about governmental accounting and other regulations that rules practices. However, they who have accounting background can learn the subjects very well.

Keywords: Accounting Staff, Accounting Training, Proper Basic Knowledge, Sustained Process Needs

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Dan Analisis Situasi**

Dalam beberapa dekade terakhir, reformasi sektor publik dan akuntansi pemerintahan telah terjadi di berbagai negara. Reformasi tersebut telah membawa berbagai praktik di sektor publik semakin mendekati praktik-praktik di sektor swasta. Reformasi dan perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan berbagai karakteristik yang seringkali disebut dengan istilah *New Public Management* (NPM). Menjadi salah satu bagian penting dari NPM, reformasi akuntansi seringkali merupakan tahap pertama dari reformasi pemerintahan, lalu diikuti oleh reformasi manajemen pemerintahan, organisasi dan bagian lain dari administrasi publik (Christiaens, 1999). Sejalan dengan pernyataan di atas, kenyataan memang menunjukkan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan sektor pemerintahan maupun sistem keuangan berbasis akrual telah diperkenalkan dan diterapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di berbagai negara (Carvalho et al., 2007).

Menurut Petterson dalam Christiaens dan Peteghem (2007), informasi akuntansi merupakan komponen kunci dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Reformasi akuntansi pemerintahan dianggap sebagai kondisi penting untuk kesuksesan reformasi di semua bidang yang berada dalam cakupan *New Public Management* (NPM) sehingga implementasi yang memadai dari reformasi akuntansi memainkan peranan penting dalam kesuksesan implementasi NPM secara keseluruhan. Proposisi ini membawa dua konsekuensi penting. Pertama, ketika sistem akuntansi baru diperkenalkan, sistem tersebut harus memenuhi semua kebutuhan dan persyaratan penting sebagai alat manajerial. Disisi lain, tanpa implementasi yang efektif dari reformasi yang dicanangkan, sistem akuntansi tidak akan mampu menyediakan informasi manajerial yang handal dan relevan. Tanpa implementasi yang memadai, semua usaha yang telah dilakukan, sasaran yang telah direncanakan dan harapan yang telah dibuat akan menjadi hilang. Adopsi dan reformasi akuntansi keuangan pun tak pelak menjadi sebuah keharusan.

Seperti halnya reformasi akuntansi pemerintahan telah berjalan dan diadopsi di berbagai negara, reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia pun sebenarnya telah mengalami proses panjang yang dimulai sekitar tahun 1979-1980 oleh Departemen Keuangan dengan rencana sebuah studi modernisasi sistem akuntansi pemerintahan. Kebutuhan akan perlunya sebuah standar

akuntansi pemerintahan ini semakin menguat dengan bergulirnya era reformasi yang memberikan sinyal yang kuat tentang perlu adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berikutnya, pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Setelah mengalami proses panjang tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai salah satu elemen penting reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini maka untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangannya.

Namun setelah standar akuntansi pemerintahan tersebut ditetapkan selama beberapa tahun, penerapan standar akuntansi pemerintahan oleh pemerintahan daerah masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemerintahan daerah yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), meskipun beberapa daerah telah mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan mendapatkan opini audit yang baik pula. Sukirman (2008) dalam Yudi, Sukoharsono dan Affandy (2008) menyatakan bahwa dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2006 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 3 LKPD (1%), opini wajar dengan pengecualian untuk 326 LKPD (71,02%), opini tidak wajar untuk 28 LKPD (6,10%), dan tidak memberikan opini untuk 102 LKPD (22,22%).

Hal ini mungkin merupakan masalah biasa dalam masa transisi tapi pengalaman yang dialami oleh pemerintahan daerah (*municipalities*) di negara bagian Flemish Belgia seperti dijelaskan dalam Christiaens dan Peteghem (2007) memperlihatkan bahwa setelah beberapa tahun reformasi sistem akuntansi tetap memperlihatkan beberapa masalah yang sama. Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran agar hal yang sama tidak terjadi pada implementasi standar akuntansi pemerintahan di Indonesia.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepantasnyalah para profesional dan akademisi akuntansi sektor publik (pemerintah) untuk ikut berperan aktif.

Pelatihan ini ditujukan bagi staf yang belum pernah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis akuntansi pemerintahan sebelumnya karena berdasarkan temuan Misra (2008) lebih-kurang 40% staf belum pernah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis akuntansi pemerintah dan hanya 24,65% staf dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Pelatihan sejenis mungkin telah banyak dilakukan, baik oleh instansi pemerintah (seperti BPKP maupun Bawasda) maupun institusi pendidikan (Lembaga-Lembaga di Perguruan Tinggi), tetapi pelatihan ini tetap akan memiliki arti penting dan kontribusi bagi pengembangan pemahaman dan pengetahuan staf akuntansi di Pemerintahan Daerah.

### **Telaah Literatur**

#### ***Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia***

Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia telah dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980 dengan rencana sebuah studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Pada saat itu, sistem administrasi pemerintah masih dilakukan secara manual. Komputerisasi masih utopia. Perhitungan Anggaran Negara (PAN), yang merupakan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR, disajikan berdasarkan sumbangan PAN Departemen/Lembaga yang disusun secara manual dan *single entry*. Akibatnya, waktu penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR adalah 2-3 tahun setelah tutup buku.

Studi modernisasi akuntansi pemerintahan diawali di tahun 1982, tetapi *Term of Reference* (TOR) yang disetujui dan dibiayai Bank Dunia masih terbatas pada pengembangan sistem pembukuan berpasangan secara manual. Upaya yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan tersebut, yaitu melakukan modernisasi terhadap akuntansi pemerintahan yang berjalan dengan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP). Kegiatan ini disebut Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi (PPSAPA), dengan pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Desain Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi yang diselesaikan pada bulan Mei 1986, terdiri atas usulan bagan perkiraan standar, usulan standar akuntansi pemerintahan, dan pembentukan unit eselon I untuk fungsi akuntansi dan pelaporan di lingkungan Departemen Keuangan. Sistem yang diusulkan dan disetujui Departemen Keuangan adalah penyusunan alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual.

Di tahun 1987/1988, simulasi sistem manual tersebut mulai dilakukan di Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Departemen Perdagangan, dan Kantor Departemen Keuangan Wilayah Jakarta, Surabaya dan Medan. Di saat bersamaan, di tahun 1988, pemikiran pengembangan sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia dalam bentuk proyek pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap I. Dalam hal ini, sistem fungsional berbasis desain manual belum dapat menghasilkan laporan keuangan. Pada tahun 1992, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) dibentuk sebagai unit pelaksana fungsi *Central Accounting Office*, dimana pengembangan standar akuntansi dan implementasi sistem dilaksanakan.

Di tahun 1994, format Daftar Isian Proyek (DIP) yang berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penggunaan bagan perkiraan standar khusus untuk pendapatan dan belanja pada APBN dimunculkan. Meski BAKUN telah beroperasi, pelaksanaan implementasi sistem tetap mengalami hambatan. Dampak tiadanya sanksi yang ada di berbagai perundang-undangan mengakibatkan pemerintah pusat, departemen dan nondepartemen tetap menggunakan sistem pembukuan tunggal, dimana kualitasnya sulit dipertanggung-jawabkan.

Dalam dunia akuntansi, sistem yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem akuntansi berpasangan, dimana semua catatan akuntansi dimulai dengan teknologi penjurnalan debit-kredit yang selalu seimbang berpasangan. Patut dicatat, pada kebanyakan pandangan pakar akuntansi, sistem pembukuan tunggal belum pantas disebut sebagai suatu akuntansi. Laporan keuangan berfokus hanya pada laporan realisasi anggaran semata. Catatan pemerintah pusat tentang investasi jangka panjang dan utang dilakukan secara tak terstruktur atau informal. Di dalamnya termasuk catatan pengeluaran yang menggunakan dana luar negeri, seperti bantuan, hibah dan utang. Karena standar akuntansi pemerintahan RI saat itu belum ada, praktik akuntansi pemerintah juga belum sesuai prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum, kode rekening akuntansi baku dan berlaku bagi semua departemen/lembaga belum ada, serta neraca tak mungkin disusun apalagi diterbitkan.

Pada tahun 1995, sebagai lanjutan dari pinjaman Bank Dunia dikembangkan lagi sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer yang *open system* melalui Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II dan implementasinya dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999 telah dilakukan implementasi sistem akuntansi instansi untuk seluruh Departemen/lembaga yang dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Namun demikian masih terkendala dalam pelaksanaannya karena pada saat itu masih belum ada ketentuan perundangan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap.

Paket bantuan IMF tahun 1997/1998 yang berisi persyaratan *good governance* umumnya, reformasi manajemen keuangan khususnya, lebih khusus lagi tentang reformasi akuntansi pemerintahan, dinilai ikut berperan mereformasi sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan negara di Indonesia.

Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya tripartit perundang-undangan tentang keuangan negara dan daerah yang dimulai dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. UU tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan Standar Akuntansi sebagai basis

penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.

UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja amat ketat dan bersanksi. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Agar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan obyektif, maka dalam tahun 2002 (sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menteri keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil dari komite tersebut setelah dimintakan pertimbangan kepada BPK dan disarankan untuk disempurnakan penetapan keanggotaannya dengan keputusan Presiden dan hasilnya harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Melalui proses panjang, ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang tugasnya mereview dan menyempurnakan draf publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan oleh komite lama yang dibentuk Menteri Keuangan. Setelah dimintakan pertimbangan dari BPK, draf tersebut diusulkan kembali melalui Menkumdam dan disetujui oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Strategi transisi juga diterapkan sampai dengan tahun anggaran 2008. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Menurut ketentuan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota harus menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran lalu berakhir. Jadwal audit BPK amat ketat, yakni hanya 2 bulan dan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK diajukan Presiden/Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada DPR/DPRD dalam enam bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir, setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lain. Selanjutnya, BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya dilakukan auditor eksternal.

Laporan keuangan pemerintah merupakan titik awal dan *trigger point* untuk pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD, titik awal keikutsertaan seluruh rakyat dalam mengawal setiap rupiah keuangan negara melalui DPR/DPRD, awal era transparansi keuangan Indonesia.

Transparansi melalui laporan keuangan akan menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi. Dengan munculnya pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan, maka BPK dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) kini mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit laporan keuangan. Para pakar ekonomi juga akan mendapat masukan terperinci tentang aspek keuangan negara misalnya rincian utang pemerintah, aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap daerah otonom, perincian penerimaan pajak dan pungutan serta yang lainnya.

Dengan terbitnya PP Nomor 24 tersebut diharapkan otonomi daerah umumnya, sistem pilkada khususnya mendapat perlindungan keamanan bidang keuangan melalui akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan berdasar standar. Rakyat pada tiap pemerintah daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya, melalui transparansi informasi keuangan berbasis standar. Keahlian, setidaknya-tidaknya pengetahuan akan sistem keuangan, perbendaharaan dan akuntansi pemerintahan diramalkan akan menjadi syarat uji kelayakan bagi calon pegawai negeri, kepala daerah, DPR dan DPRD di masa depan.

### ***Peranan Pelatihan Akuntansi bagi staf Akuntansi Pemerintah Daerah***

Secara empiris, berbagai temuan telah mengemukakan beberapa faktor penting yang mempengaruhi praktik dan kemampuan daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Ingram (1984) memasukkan dan menguji profesionalisme staf sebagai salah satu determinan praktik akuntansi pemerintahan meskipun penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah pengungkapan (*disclosure*). Berikutnya Cheng (1992) menguji faktor profesionalisme birokrasi internal sebagai bagian dari model yang diajukannya untuk menilai praktik pengungkapan dalam pelaporan keuangan municipal (pemerintahan daerah).

Downs (1976) dalam Hendry (1999) mengakui bahwa birokrat mempunyai peran yang signifikan dalam perumusan kebijakan. Sebagai contoh, ketika gubernur atau bupati/walikota atau anggota legislatif mengusulkan sebuah program baru, proposal tersebut mengacu kepada birokrasi yang akan bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan administrasi program tersebut. Birokrat dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam perumusan kebijakan publik dengan mengontrol tipe dan jumlah informasi yang akan diberikan oleh pembuat kebijakan.

Pada berbagai penelitian terdahulu, profesionalisme dimasukkan sebagai salah satu konstruk dari faktor insentif manajemen (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Christiaens, 1999). Penelitian ini hanya memfokuskan pada konstruk profesionalisme staf bagian akuntansi. Profesionalisme staf bagian akuntansi akan diukur dalam beberapa ukuran. Yang pertama, disiplin ilmu staf bagian akuntansi yang belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan indikator ini sebelumnya dilakukan oleh Holmes dan Nicholls dalam Misra (2004) tentang praktek akuntansi usaha kecil dan menengah di Australia dan menemukan hubungan yang signifikan antara disiplin ilmu dengan tingkat praktik akuntansi pada UKM. Penelitian sebelumnya pada sektor publik menggunakan indikator tingkat pendidikan (seperti Evans dan Patton, 1983; Cheng, 1992; Christiaens dan Pateghem, 2004), pelatihan akuntansi (Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007; Vecchio, Johnson dan Magner, 2004), keanggotaan dalam institusi profesional (Christiaens, 1999), pengalaman akuntansi bisnis staf (Christiaens, 1999) dan gaji staf akuntansi (Ingram, 1984). Christiaens (1999) menemukan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah di negara bagian Flemish tetapi menemukan hasil yang berbeda ketika menguji evolusi implementasi akuntansi (Christiaens dan Pateghem, 2007).

Secara lebih spesifik terhadap masalah pelatihan akuntansi, Christiaens (1999) dan Christiaens dan Pateghem (2007) menemukan bahwa pelatihan bagi staf akuntansi merupakan determinan praktik akuntansi pemerintah daerah di Belgia. Meskipun pelatihan menjadi tidak signifikan setelah beberapa tahun implementasi, tetapi pada tahun-tahun awal diperkenalkan sistem akuntansi baru, pelatihan bagi staf adalah hal yang krusial dan kritis. Di Indonesia, Misra (2008) menemukan bahwa variabel pelatihan akuntansi bagi staf di bagian akuntansi sebagai bagian dari konstruk profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi pemerintah daerah. Salah satu penjelasan penting dari temuan ini adalah kesadaran dari daerah untuk meningkatkan kemampuan akuntansi stafnya karena masih terbatasnya staf pada bagian akuntansi di Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlatar-belakang pendidikan akuntansi. Begitu juga dengan temuan Latifah dan Sabeni (2007) yang menemukan bahwa pelatihan adalah variabel yang signifikan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

## **METODE PENGABDIAN**

Nama kegiatan ini adalah **Pelatihan Akuntansi bagi Staf Akuntansi Pemerintah Daerah** yang merupakan kegiatan pelatihan dengan memberikan penyajian tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam bentuk tutorial, diskusi dan simulasi. Dalam pelaksanaannya, disamping diberikan materi sesuai dengan modul yang disiapkan peserta juga akan dilatih dengan penyelesaian kasus-kasus akuntansi pemerintah yang sesuai dengan topik bahasan untuk mendukung pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan.

### **Tujuan Kegiatan**

Pelatihan akuntansi bagi staf akuntansi pada Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan staf dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) sehingga diharapkan untuk masa-masa yang akan datang laporan keuangan pemerintah daerah menjadi semakin berkualitas, yang salah satunya diperlihatkan opini audit.

Disamping memberikan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan, pelatihan ini juga ditujukan agar peserta juga mengenali aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan secara khusus, keuangan Negara dan daerah secara khusus.

### **Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pelatihan akuntansi bagi staf akuntansi pemerintah daerah ini adalah:

1. Peserta diharapkan dapat memahami tentang urgensi akuntansi bagi pemerintah daerah baik untuk tujuan manajerial maupun tujuan dalam rangka perwujudan akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Meningkatkan keterampilan staf akuntansi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

### **Khalayak Sasaran**

Oleh karena pelatihan ini sangat strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf akuntansi pemerintah daerah baik dalam penyajian laporan keuangan maupun dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, maka pelatihan ini diharapkan dapat diikuti oleh staf akuntansi pada Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah semua Kota/Kabupaten di Sumatera Barat. Secara lebih spesifik, karena masih banyaknya staf akuntansi di daerah yang tidak berlatar-belakang pendidikan akuntansi dan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan/bimbingan teknis akuntansi pemerintah, maka kegiatan pelatihan ini lebih mengharapkan dan memprioritaskan partisipasi dari staf yang belum pernah ikut pelatihan/bimbingan teknis tersebut dengan tidak menutup peluang bagi staf yang telah pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis.

### **Materi Pelatihan**

Materi dalam kegiatan ini dirancang agar peserta dapat memahami akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan baik sehingga disamping pemahaman tentang teknis akuntansi pemerintahan peserta juga akan dibekali dengan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Secara lebih rinci, materi yang diberikan adalah:

1. Pengenalan terhadap Rerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintah
2. Siklus Akuntansi Pemerintah:
  - a. Pengantar Akuntansi Pemerintahan: Bukti Transaksi dan Penjurnalan
  - b. Pemindahbukuan, Penyiapan Neraca Saldo dan Penyesuaian
  - c. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - d. Jurnal Penutup, Neraca Saldo Setelah Penutupan dan Jurnal Balik.

### **Metode Evaluasi**

Evaluasi terhadap peserta dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap teori dan konsep akuntansi pemerintah daerah serta keterampilan dalam mengerjakan kasus-kasus akuntansi pemerintahan. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan memberikan *pre-test* dan *post-test* bagi peserta pelatihan. *Pre-test* dilakukan terhadap peserta sebelum peserta dibekali dengan materi sementara *post-test* akan dilakukan setelah semua materi disajikan. Pemahaman peserta akan dinilai dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (fasilitas, materi dan cara penyajian oleh instruktur/pengabd) dilakukan melalui lembar evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan skedul acara yang telah disusun sebelumnya. Jumlah peserta yang akhirnya mengikuti kegiatan ini hanya 12 orang. Semua materi yang disusun berdasarkan skedul tersebut terlaksana dalam suasana belajar yang interaktif karena para peserta adalah para praktisi akuntansi keuangan di daerah masing-masing sehingga banyak hal yang mereka diskusikan. Diantara permasalahan yang banyak mereka pertanyakan adalah tentang sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan pada kantor mereka masing-masing, kebijakan akuntansi pemerintahan daerah mereka yang belum sepenuhnya dapat mereka pahami dengan baik dan teknis-teknis akuntansi pemerintahan yang relatif berbeda dengan teknis akuntansi komersil (bisnis) yang selama ini cukup mereka pahami. Pemahaman dan sinkronisasi berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pemerintahan juga banyak mereka pertanyakan. Disamping materi akuntansi pemerintahan, para peserta juga banyak bertanya tentang perpajakan (khususnya masalah pajak yang banyak berkaitan dengan bendaharawan seperti Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai).

Evaluasi terhadap peserta dilakukan dengan kembali mengadakan tes pada akhir pertemuan (post-test) dan hasilnya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pre test mereka. Pre-test dilakukan sebagai panduan/ acuan bagi instruktur untuk melihat/menilai pemahaman awal para peserta terhadap akuntansi pemerintahan. Kemudian, sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian ini para peserta diberikan sertifikat kegiatan.

### **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tindak Lanjut**

Sedianya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini baik menyangkut fasilitas dari panitia pelaksanaan, materi yang diberikan maupun cara penyajian oleh instruktur (pengabdi) dilakukan melalui kertas evaluasi yang diisi oleh para peserta tetapi karena terbatasnya waktu pelaksanaan sementara banyak hal yang ingin peserta diskusikan, maka lembar evaluasi tidak jadi dibagikan kepada para peserta. Sampai dengan batas waktu menurut skedul kegiatan (jam 17.00 WIB), para peserta masih berdiskusi tentang akuntansi pemerintahan dan perpajakan yang memang juga kami fasilitasi karena ada beberapa diantara peserta merupakan bendaharawan di kantor mereka yang berkepentingan dengan pajak bendaharawan.

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu yang cukup rumit bagi para praktisi akuntansi pemerintahan di daerah, karena disamping teknisnya yang berbeda dengan akuntansi bisnis yang selama ini lebih dipahami peserta banyak regulasi-regulasi yang mengatur praktik akuntansi pemerintahan itu sendiri sehingga pemberian materi selama 1 (satu) hari jelas sangat minim bagi peserta untuk memahami dengan baik praktik dan konsep akuntansi pemerintahan. Sebagai tindak lanjut untuk membantu penyelesaian masalah ini, pengabdi membuka ruang untuk berdiskusi dengan peserta melalui media surat elektronik (e-mail).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Carvalho, Joao Baptista da Costa., Jorge, Susana M, dan Maria Jose Fernandez. 2007. *Conformity and Diversity of Accounting Financial Reporting Practise in Portuguese Local Government*. Canadian Journal of Administrative Science.
- Cheng, Rita Hartung. 1992. *An Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government Accounting Disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Christiaens, Johan dan Peteghem, Vincent Van. 2007. *Governmental Accounting Reform: Evolution of Implementation in Flemish Municipalities*. Financial Accountability and Management.
- Christiaens, Johan. 1999. *Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation*. Financial Accountability and Management.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintah: Telaah Kritis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hendry, Byron Keith. 1999. An Empirical Investigation of The Initial Production of State Government Financial Reports in Conformance with Generally Accepted Accounting Principle (GAA). Texas A&M University. Disertasi.
- Ingram, Robert W. 1984. *Economic Incentive and The Choice of State Government Accounting Practise*. Journal of Accounting Research, Vol. 22 No 1 Spring 1984
- Latifah, Lina dan Sabeni, Arifin. 2007. *Faktor Kepriilaku Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Misra, Fauzan. 2008. *Investigasi dan Analisis Empiris Praktik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten di Propinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah)*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tidak Dipublikasi.
- Vecchio, Stephen C. Del, Johnson, Gary G dan Magner, Nace R. 2000. GASB 34 and Its Implementation: Persepective of Government Accounting and Finance Official. Working Paper.

Yudi, Sukoharsono dan Affandy. 2008. *Studi Fenomenologis Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Akuntansi Sektor Publik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kota Pusako di Provinsi Jambi dalam Pemahaman Functionalism Structural Parsons*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak.